



Judul : Yuk, Fokus Bangun Lumbung Pangan: Antisipasi Krisis Pangan
Tanggal : Kamis, 14 Januari 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Antisipasi Krisis Makanan Yuk, Fokus Bangun Lumbung Pangan

DPR mendukung upaya pemerintah membangun sektor pertanian dan lumbung pangan (*food estate*) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pasalnya, pembatasan mobilitas warga dan distribusi barang antar negara akibat pandemi, berpotensi melahirkan krisis pangan, khususnya komoditas impor.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengajak seluruh elemen bangsa mendukung program tersebut, karena potensi krisis pangan akibat pandemi Covid-19 telah menjadi wacana dunia. Potensi krisis pangan akibat pembatasan mobilitas manusia dan terkendalanya distribusi antarnegara lantaran pandemi Covid-19, jelasnya, harus diantisipasi.

"Pemerintah harus mengupayakan tata kelola pertanian tumbuh lebih baik. Memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Azis melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Dia pun menguraikan sejumlah target yang akan dilakukan pemerintah pada tahun ini. Menurutnya, pembangunan lumbung pangan di Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Papua merupakan proyeksi yang cukup realistis diselesaikan.

Azis mendorong target-target tersebut disertai peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan transmigrasi atau petani eksisting dan investasi *small farming*. Selain itu, dilakukannya revitalisasi sistem pangan nasional, dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan.

Menurutnya, tenaga kerja yang dipekerjakan di sektor ini luar biasa besar. Income di sektor ini juga sangat besar. Karenanya, jika program-program yang diagendakan pemerintah berjalan sesuai target, akan terjadi penyerapan tenaga kerja dan penciptaan pendapatan yang luar biasa besar.

Azis juga mendorong pemerintah fokus pada sejumlah komoditas impor, seperti kedelai, jagung, gula, dan bawang putih. "Selain mengurangi jumlah impor komoditas pangan, fokus tersebut akan membawa Indonesia pada swasembada dan ketahanan pangan nasional," tandas tegas Mantan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Sebab, mobilitas warga dan distribusi barang antar negara dibatasi lantaran pandemi Covid-19.

"Dalam kondisi pandemi Covid-19, sektor pertanian menempati posisi yang semakin sentral. Kita tahu, Badan Pangan Dunia (FAO) memperingatkan potensi terjadinya krisis pangan. Hati-hati mengenai ini," ujar Jokowi, saat membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2021 secara virtual, Senin (11/1) lalu.

Jika dibiarkan berjalan tanpa pedoman, lanjut dia, potensi terjadinya kendala distribusi pangan di seluruh dunia akan semakin besar. Salah satu contohnya, persoalan kedelai, tahu dan tempe. Karenanya, ia mengingatkan, persoalan potensi krisis pangan tak boleh dianggap remeh. ■ ONI